

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab V penulis menyimpulkan keseluruhan pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penulis ajukan dalam pembatasan masalah. Disamping itu penulis juga mengajukan usul dan saran untuk mengembangkan pemikiran tersebut dalam konteks politik Indonesia.

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dalam kesimpulan ini penulis meneliti jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah skripsi. Dalam rumusan masalah skripsi ini, penulis mengajukan tiga rumusan masalah: Apa yang dimaksud dengan warga negara oleh Aristoteles? Apa yang dimaksud dengan politik oleh Aristoteles? Bagaimana peran warga negara dalam politik menurut Aristoteles? Dengan demikian penulis berusaha meneliti jawaban atas pertanyaan tersebut dari buku *The Politics*. Penulis berusaha merumuskan konsep keterlibatan warga negara dalam politik menurut Aristoteles sebagai berikut. Sebelum berbicara tentang keterlibatan warga negara dalam politik, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan warga negara menurut Aristoteles.

Penulis berusaha manrik beberapa kesimpulan dari skripsi sebagai berikut:

1. Proses terbentuknya negara menurut Aristoteles adalah melalui beberapa tahap yakni mulai dari *rumah tangga* karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri sehingga membutuhkan *desa* demikian seterusnya sampai pada terbentuknya negara (*polis*). Negara merupakan unsur paling tinggi yang mampu mencukupi segala kebutuhan dan keinginan manusia.
2. Negara harus memiliki tujuan yakni kebaikan. Kebaikan tersebut harus berlaku bagi warga negara secara keseluruhan karena keseluruhan lebih utama dari bagian-bagiannya. Negara harus menjamin kesejahteraan bersama karena hanya dengan kesejahteraan bersama, kesejahteraan individu dapat terpenuhi. Dengan demikian manusia akan menjadi lebih manusiawi apabila manusia berada di dalam negara.
3. Warga negara menurut Aristoteles adalah orang yang terlibat aktif dalam segala aktivitas politik. Kewajiban seorang warga negara adalah terlibat aktif di dalam jabatan deliberasi dan yudikatif. Tidak semua orang dapat dikatakan sebagai warga negara. Warga negara Aristoteles adalah warga negara yang terbatas. Jadi tidak semua dikatakan sebagai warga negara. Anak-anak, orang tua, budak, montir serta orang asing tidak dikatakan sebagai warga negara.
4. Politik merupakan sesuatu kecenderungan yang melekat pada diri manusia dan khas manusia. Dengan demikian manusia berbeda dengan makhluk lain, karena manusia memiliki kemampuan yang dapat mengembangkan potensi-potensinya. Manusia mampu bekerja sama berdasarkan diskursus rasional, pertimbangan dan debat dalam kesadaran kritis. Sebagai makhluk

politik, manusia tidak dapat memisahkan diri atau tanpa kehadiran dengan manusia lainnya, karena manusia tidak dapat mencukupi dirinya apabila memisahkan dari kehidupan sosial.

5. Bagi Aristoteles, setiap warga negara harus memiliki keutamaan. Masing masing orang memiliki keutamaan dan kebaikan yang berbeda. Keutamaan harus dimiliki oleh semua warga negara sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Sedangkan keutamaan manusia yang baik tidak dimiliki oleh setiap orang. Seorang manusia yang baik harus memiliki kebijaksanaan praktis. Hal tersebut yang diperlukan oleh sebuah negara untuk menjadi pemimpin. Menurut Aristoteles, antara orang yang memerintah dan yang diperintah memiliki pengetahuan yang berbeda.
6. Warga negara bagi Aristoteles adalah orang yang terlibat di dalam tugas-tugas deliberatif dan yudisial. Warga negara berhak untuk terlibat di dalam proses deliberasi dan pengambilan suatu keputusan. Menjadi warga negara berarti terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sebuah kedaulatan. Aristoteles juga membuat pembatasan atas warga negara, tidak semua orang disebut sebagai warga negara. Seorang warga negara memiliki hak sipil, yaitu hak untuk terlibat dalam tugas-tugas kenegaraan. Sedangkan seorang yang bukan warga negara tidak dituntut untuk terlibat dalam urusan kenegaraan. Dengan demikian anak-anak, orang tua, budak dan orang asing tidak disebut sebagai warga negara karena mereka tidak terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan.

7. Aristoteles juga menjelaskan bagaimana keterlibatan warga negara dalam politik. Menurutnya, keterlibatan warga negara dalam memerintah tidak dapat dilakukan secara serempak melainkan dapat memegang jabatan secara bergiliran sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama. Ada tiga unsur kekuasaan dalam pemerintahan yakni deliberatif, eksekutif, dan yudisial. Masing-masing unsur tersebut dapat dijabat oleh warga negara sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Masing-masing unsur tersebut dapat membantu warga negara dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan.

## 5.2 USUL DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini hanya sebatas konsep keterlibatan warga negara dalam politik menurut Aristoteles. Penelitian ini melibatkan buku yang ditulis oleh Aristoteles sendiri, *The Politics*. Dengan demikian melalui penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan usul dan saran bagi para mahasiswa fakultas filsafat, civitas akademika dan pemerintah Indonesia.

Pertama, penulis memberikan usul kepada para mahasiswa Fakultas Filsafat yang hendak mengadakan penelitian tentang pemikiran Aristoteles. Penulis mengusulkan untuk meneliti tentang kebijaksanaan praktis (*practical wisdom*) menurut Aristoteles ditinjau dari filsafat politik. Penulis mengusulkan tema tersebut karena pemikiran Aristoteles dapat menjadi pedoman dasar untuk dimiliki oleh para calon pemimpin masa depan bangsa. Penulis berharap dengan

adanya penelitian di bidang tersebut dapat memberikan pendasaran yang tepat dan jelas mengenai tujuan dan maksud Aristoteles dalam menyarankan tindakan para calon pemimpin untuk terlibat di dalam politik.

Kedua, penulis mengusulkan kepada civitas akademika yang hendak mengadakan penelitian tentang pemikiran Aristoteles. Banyak tema yang disajikan di dalam buku *The Politics*, yang dapat dikaitkan dengan konteks realitas masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa tema tersebut misalnya, kebijaksanaan praktis, keutamaan, dan keadilan. Penulis mengusulkan kepada civitas akademika agar tema-tema tersebut dapat digali dan dibahas dengan berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan.

Ketiga, penulis mengusulkan kepada kader-kader partai politik untuk menggali sumber-sumber pemikiran politik Aristoteles misalnya nilai atau karakter pemimpin yang berkualitas sehingga dapat memunculkan pemimpin yang berintegritas. Dengan semangat pemikiran politik Aristoteles dapat membawa para calon pemimpin dan pemimpin untuk memperjuangkan *bonum commune*.

Keempat penulis memberikan saran kepada pemerintah Indonesia. Penulis melihat bahwa konsep pemikiran Aristoteles tentang kebijaksanaan praktis dapat dikembangkan dalam proses pendidikan di tanah air. Harus dilihat bahwa proses pendidikan bukan hanya menciptakan manusia-manusia pragmatis tetapi harus menciptakan manusia yang bermutu. Pendidikan harus mampu memberi arah yang benar pada hidup manusia. Pendidikan harus mampu membangun kekuatan intelektual dan etis yang membuat kita mampu memberi arah yang semestinya

pada hidup manusia. Dengan demikian akan menciptakan generasi pemimpin-pemimpin Indonesia yang bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan demi memperjuangkan kebaikan umum.

Menurut penulis, konsep kebijaksanaan praktis yang dikembangkan oleh Aristoteles sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yakni pendidikan karakter. Karakter anak bangsa harus dibangun sejak dini sehingga mereka akan menjadi manusia yang bijaksana dalam segala hal, misalnya bijak mengambil keputusan apabila seorang dipilih menjadi pemimpin di lingkungan sekolah. Kebiasaan yang dibangun sejak dini tersebut akan berimplikasi pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku Sumber Utama

ARISTOTLE, *The Politics*, diterjemahkan oleh, T. A. Sinclair, Penguin Books, London 1992.

### 2) Buku-Buku Pendukung Sumber Utama

ANAGNOSTOPOULOS, GEORGIOS, *A Companion to Aristotle*, Blackwell Publishing, West Sussex, 2009.

DESLAURIERS, MARGUERITE and DESTREE, PIERRE (eds.), *The Cambridge Companion to Aristotle's Politics*, Cambridge University Press, New York 2013.

KOTEN, YOSEP KLADU, *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, Ledalero, Maumere 2010.

MILER, FRED D., *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics*, Oxford University Press, New York 1995.

RAPAR, J. H., *Filsafat politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelly*, PT Rajawali Grasindo, Jakarta 2001.

RAPAR, J. H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta 1998.

ROSS, SIR DAVID, *Aristotle*, Routledge, New York, 1995

SUSENO, FRANZ MAGNIS, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta 2009.

### **3) Buku-Buku Pendukung Lain**

BAGHI, FELIX, *Kewarganegaraan Demokrasi Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere 2009.

BORRONG, ROBERT P., *Etika Politik Kristen, Serba-serbi Politik Praktis*, Unit Pusat Studi Jakarta dan Pusat Studi Etika Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta 2006.

BUDIYONO, H. KABUL, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung 2012.

HARDIMAN, F. BUDI, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis sampai Cyberspace*, Kanisius, Yogyakarta 2010.

HARYATMOKO, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta 2014.

MADUNG, OTTO GUSTI, *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia*, Ledalero, Maumere 2011.

KLEDEN, PAUL BUDI, *Catatan Tentang Pemilu: Bukan Doping Politik*, Ledalero, Maumere 2013.

RIYANTO, ARMADA, *Berfilsafat Politik*, Kanisius, Yogyakarta 2011.



SCHMANDT, HENRY J., *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009.

SUSENO, FRANZ MAGNIS, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

#### **4) Buku-Buku Referensi**

BAGHI, FELIX (Ed.), *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*, Ledalero, Maumere, 2012.

BERTENS, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta 2013.

COPLESTON, FREDRICK, *A History of Philosophy, Vol. I: Greece and Rome*, Image Books, New York 1993.

HARDIMAN, F. BUDI, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta 2013.

HADIRMAN, F. BUDI, *Dalam moncong oligarki, Skandal Demokrasi Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

SUSENO, FRANS MAGNIS, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke 19*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

TJAHJADI, SIMON PETRUS L., *Petualangan Intelektual: Konfrontasi Dengan Para Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, Kanisius, Yogyakarta 2004.

##### **5) Sumber Surat Kabar dan Jurnal**

KOMPAS, *Politik Dan Hukum: Jajak Pendapat*, 6 April 2015.

JURNAL LEDALERO, *Pemilu dan Demokratisasi*, vol.7, No.2, Desember 2008.